DISERTASI

KONFLIK DAN KONSENSUS INTERNAL PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN TAHUN 2014-2020

NGUDI HASTUTI
NPM: 236701519003

UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM DOKTOR ILMU POLITIK
JAKARTA
2026

DISERTASI

KONFLIK DAN KONSENSUS INTERNAL PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN TAHUN 2014-2020

NGUDI HASTUTI
NPM: 236701519003

Disertasi ini Diajukan sebagai Salah Satu Syarat

untuk Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Politik

UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM DOKTOR ILMU POLITIK
JAKARTA
2026

PERNYATAAN

Dengan ini, saya menyatakan bahwa :

1. Disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik Doktor, baik di Universitas Nasional maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Disertasi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, dengan arahan Tim Promotor.
3. Di dalam disertasi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dan atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis yang telah dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebut nama pengarang dan judul buku/tulisan dalam catatan kaki dan daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena disertasi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Jakarta, 28 Januari 2026

Yang Membuat Pernyataan,



NGUDI ASTUTI
NPM: 236701519003

UNIVERSITAS NASIONAL

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN DISERTASI

(TERBUKA)

Judul Disertasi **KONFLIK DAN KONSENSUS INTERNAL PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) TAHUN 2014 - 2020**
Promotor: **Prof. Dr. Lili Romli, M.Si** Ko-Promotor: **Drs. Firdaus Syam, MA., Ph.D**
Mengetahui Program Doktor Ilmu Politik Ketua, **Dr. TB Massa Djafar, M.Si** Tanggal :
Nama : NGUDI ASTUTI **NPM : 236701519003**

UNIVERSITAS NASIONAL

HASIL UJIAN PROMOSI

Disertasi yang ditulis oleh **NGUDI ASTUTI,** pada Program Doktor Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional dengan judul:

KONFLIK DAN KONSENSUS INTERNAL PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) TAHUN 2014 - 2020

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada tanggal 28 Januari 2026 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai ……. dan predikat …..

Jakarta, 28 Januari 2026
TIM PENGUJI,

	NAMA	TANDA TANGAN
KETUA SIDANG	**: Prof. Dr. Suryono Efendi,S.E., M.B.A., M.M.**	.....
PROMOTOR	**: Prof. Dr. Lili Romli, M.Si**	.....
KO-PROMOTOR	**: Drs. Firdaus Syam, M.A., Ph.D**	.....
PENGUJI	**: Prof. Dr. Maswadi Rauf, M.A**	.....
PENGUJI	**: Dr. TB. Massa Djafar, M.Si**	.....
PENGUJI AHLI	**: Prof. Amir Santoso, M.Soc., Sc., Ph.D**	.....

UNIVERSITAS NASIONAL

ABSTRAK

Universitas Nasional
Pascasarjana Program Doktor Ilmu Politik
A. Nama : Ngudi Astuti
B. NPM : 206701519005
C. Judul : **KONFLIK DAN KONSENSUS INTERNAL PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) TAHUN 2014-2020.**

D. Isi Abstrak :
Disertasi ini mengkaji konflik dan konsensus internal PPP periode 2014-2020, dengan fokus pada tiga aspek utama: perkembangan dan intensitas konflik, mekanisme konsensus dalam penyelesaiannya, serta dampaknya terhadap keberlangsungan partai. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, berdasarkan wawancara mendalam dengan sepuluh informan kunci dan analisis dokumen seperti putusan pengadilan, dokumen partai, literatur akademik dan pemberitaan media. Analisis dilakukan melalui triangulasi sumber dan pendekatan teoritis multiperspektif untuk memastikan validitas temuan. Dibandingkan penelitian terdahulu seperti Feri Irawan (2018) tentang arbitrase konflik PPP, Qurnia Indah (2020) mengenai intervensi pemerintah, Lili Romli (2017) tentang pragmatisme politik partai dan Aji Deni (2020) terkait faksionalisasi di daerah disertasi ini menghadirkan kajian komprehensif pertama yang menelaah konflik PPP 2014 2020 secara utuh, dengan menekankan intensitas konflik dan mekanisme konsensus politik sebagai fokus utama penelitian.
Secara akademis, penelitian ini menerapkan Teori Konflik Politik dan Teori Konsensus Model Gabungan dan Pengadilan Maswadi Rauf untuk menjelaskan konflik antara kubu SDA/Djan Faridz vs Rommy yang dipicu perbedaan dukungan politik dan perebutan kekuasaan, serta diselesaikan melalui kombinasi jalur hukum dan negosiasi politik. Selain itu, digunakan pula Teori Situasi Konflik Paul Conn, Teori Faksi Zariski, Teori Intensitas Konflik Cobb, Teori Intervensi Pemerintah Fisher, Teori Rekonsiliasi Raymond & Petersen dan Teori Konsensus Moral Emile Durkheim untuk menganalisis dinamika konflik dan proses islah di PPP. Secara praktis, penelitian ini memberi kontribusi bagi partai politik dalam membangun mekanisme penyelesaian konflik yang efektif, bagi pemerintah dalam menjaga netralitas pengesahan kepengurusan partai, serta bagi akademisi dan masyarakat sebagai referensi empiris resolusi konflik tanpa perpecahan.
Penelitian ini menemukan berupa pola baru dalam penyelesaian konflik internal partai politik melalui studi kasus PPP antara kubu SDA/Djan Faridz vs Rommy, berbeda dengan konflik-konflik sebelumnya yang berakhir dengan perpecahan dan pembentukan partai baru, konflik kali ini justru diselesaikan melalui jalur hukum, negosiasi dan rekonsiliasi politik. Pihak yang kalah memilih bersatu kembali dalam struktur partai. Fenomena ini menunjukkan model baru penyelesaian konflik internal partai melalui mekanisme konsensus hukum dan rekonsiliasi politik pragmatis bukan melalui disintegrasi. Temuan ini menjadi Novelty penelitian yang memperkaya kajian tentang penyelesaian konflik dalam partai politik Islam di Indonesia Kontribusi teoritis penelitian ini terletak pada pengembangan teori *Zero-sum Conflict* Paul Conn melalui perumusan konsep *Quasi Zero-sum Conflict***.** Temuan menunjukkan bahwa konflik internal PPP dijalankan dalam logika kalah-menang, namun diselesaikan melalui semi *win-win solution* berupa kompromi pragmatis dan rekonsiliasi simbolik yang menjaga keberlanjutan organisasi tanpa menghasilkan kesetaraan kekuasaan secara penuh. Fenomena ini menjadi novelty teoritis dalam pengembangan teori konflik politik.
Kata kunci: Konflik, Konsensus, PPP (2014-2020)

ABSTRACT

Nasional University
Postgraduate Doctoral Program in Political Science
A. Name : ***Ngudi Astuti***
B. NPM : ***236701519003***
C. Title : ***Internal Conflict and Consensus within the United Development Party (PPP), 2014-2020.***

D. Abstract Content :

This dissertation examines internal conflict and consensus within the United Development Party (PPP) during the period 2014-2020, focusing on three main aspects: the development and intensity of conflict, the mechanisms of consensus in conflict resolution, and their impact on party sustainability. This study employs a qualitative method with a case study approach, based on in-depth interviews with ten key informants and document analysis, including court rulings, party documents, academic literature, and media coverage. Data analysis was conducted through source triangulation and a multiperspective theoretical approach to ensure the validity of the findings.

Compared to previous studies such as Feri Irawan (2018) on conflict arbitration within PPP, Qurnia Indah (2020) on government intervention, Lili Romli (2017) on party political pragmatism, and Aji Deni (2020) on regional factionalism this dissertation presents the first comprehensive study that examines the 2014-2020 PPP conflict in its entirety, emphasizing conflict intensity and political consensus mechanisms as the main analytical focus.

Academically, this research applies Political Conflict Theory and Maswadi Rauf's Combined Model of Consensus and Justice to explain the conflict between the SDA/Djan Faridz faction and the Rommy faction, which was triggered by differences in political support and struggles for power and resolved through a combination of legal channels and political negotiation. In addition, the study employs Paul Conn's Conflict Situation Theory, Zariski's Factionalism Theory, Cobb's Conflict Intensity Theory, Fisher's Government Intervention Theory, Raymond & Petersen's Reconciliation Theory, and Émile Durkheim's Moral Consensus Theory to analyze the dynamics of conflict and the reconciliation process within PPP.

Practically, this research contributes to political parties by offering insights into effective conflict resolution mechanisms, to the government by reinforcing the importance of neutrality in the legalization of party leadership, and to academics and society by providing an empirical reference for conflict resolution without organizational fragmentation.

This study identifies a new pattern of internal party conflict resolution through the PPP case between the SDA/Djan Faridz faction and the Rommy faction. Unlike previous conflicts that ended in party splits and the formation of new parties, this conflict was resolved through legal processes, negotiation, and political reconciliation. The losing faction ultimately chose to reunify within the party structure. This phenomenon demonstrates a new model of internal party conflict resolution through legal-consensus mechanisms and pragmatic political reconciliation rather than disintegration.

These findings constitute a research novelty that enriches the study of conflict resolution within Islamic political parties in Indonesia. The theoretical contribution of this study lies in the development of Paul Conn's Zero-sum Conflict theory through the formulation of the Quasi Zero-sum Conflict concept. The findings indicate that internal conflicts within PPP operate under a win-lose logic but are resolved through a semi win-win solution in the form of pragmatic compromise and symbolic reconciliation, which preserves organizational continuity without producing full equality of power. This phenomenon represents a theoretical novelty in the development of political conflict theory.

***Keywords**: Conflict, Consensus, United Development Party (PPP), 2014-2020*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ..... **ii**
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN DISERTASI ..... **iii**
HASIL UJIAN PROMOSI ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
ABSTRACT ..... **vi**
KATA PENGANTAR ..... **vii**
DAFTAR ISI ..... **x**
DAFTAR TABEL ..... **xiv**
DAFTAR GAMBAR ..... **xv**
DAFTAR SINGKATAN/AKRONIM LENGKAP ..... **xvi**
GLOSARI/ISTILAH KHUSUS LENGKAP ..... **xvii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 28
D. Manfaat Penelitian 29
1. Secara teoretis 29
2. Manfaat Praktis 30
E. Literatur Review 31
F. Kerangka Teori 34
1. Teori Konflik Politik 34
2. Teori Faksi 45
3. Teori Konsensus Politik 50
G. Kerangka Pemikiran 60
H. Metode Penelitian 61
1. Pendekatan Penelitian 61
2. Metode Penelitian Studi Kasus *(Case Study)* 62
3. Sumber Data dan Informasi/Narasumber 63

4. Analisis Data 66
I. Sistematika Penulisan 67
BAB II PERKEMBANGAN KONFLIK INTERNAL PPP : PERSPEKTIF HISTORIS 70
A. Sejarah Perkembangan PPP 70
B. Trajektori Konflik Internal PPP Pada Tahun 1973-2002..... 86
1. Konflik Ideologi (Asas tunggal Pancasila) PPP vs konflik Orde Baru 86
2. Konflik kepentingan antar unsur NU vs unsur MI periode Jhon Naro sehingga NU ke luar dari PPP 91
3. Konflik kubu Hamzah Haz vs kubu Zainuddin MZ: Pengunduran Muktamar Partai, Zainuddin MZ ke Luar Dari PPP Membuat Partai Tandingan yaitu PPP Reformasi Kemudian Menjadi PBR 96
BAB III PERKEMBANGAN DAN INTENSITAS KONFLIK (2014-2020)..... 112
A. Konflik Kubu SDA vs Kubu Rommy (Fase Pertama) Tahun 2014-2016 112
1. Krisis Kepemimpinan dan Pragmatisme Politik..... 113
2. SDA Ingin Menjadi Capres, Namun tidak Mendapat Dukungan Mayoritas Internal PPP 116
3. SDA Menghadiri Undangan dan Menjadi Jurkam Kampanye di Partai Gerindra di GBK serta Mendukung Prabowo sebagai Capres RI pada Pilpres 2014 119
4. Perbedaan Arah Dukungan Koalisi 126
5. SDA terlibat Kasus Korupsi Dana Operasional Menteri (DOM)..... 140
B. Konflik Kubu Rommy vs Kubu Djan Faridz Fase ke Dua (2016-2020)... 147
1. Rommy terpilih sebagai Ketua Umum Muktamar Surabaya..... 147
2. Djan Faridz terpilih Menjadi Ketua Umum Muktamar Jakarta..... 151
3. Mahkamah Partai Membatalkan Muktamar Kubu Rommy vs Muktamar Kubu Djan Faridz 156

4. Muktamar Islah di Pondok Gede: Rommy terpilih Sebagai Ketua Umum 157
5. Djan Faridz tidak Mengakui Kepemimpinan Rommy dan Menggugat ke PTUN Hasilnya Dimenangkan Djan Faridz 162
6. Kubu Rommy Melakukan Banding Hasilnya Menang..... 162
C. Sikap Fusi Melihat Konflik Internal PPP (2014-2020) 165
1. Sikap Parmusi: Konflik Merugikan Konsolidasi Umat..... 165
2. Sikap Sikap SI: Konflik sebagai Krisis Kepemimpinan Elite 168
3. Sikap Perti: Konflik sebagai Masalah Elite Pusat 169
4. Sikap NU: Konflik terjadi Bukan karena NU, melainkan Perebutan Kekuasaa dan Posisi di Partai..... 170
D. Intervensi Pemerintah terhadap Konflik dan Konsensus PPP (2009-2014)..... 172
E. Intensitas Konflik Internal PPP (2014-2020) 176
1. Konflik Lisan terbuka..... 176
2. Pendudukan Kantor DPP PPP 181
3. Ke dua Kubu Saling Menggugat ke Pengadilan..... 187
BAB IV PENYELESAIAN KONFLIK DI INTERNAL PPP 193
A. Konsensus Melalui Mahkamah Partai 194
1. Efektivitas Mahkamah Partai..... 195
2. Kewenangan Mahkamah Partai Politik 197
3. Eksistensi Mahkamah Partai Politik dalam Penyelesaian Sengketa Internal Partai..... 201
4. Muktamar Islah di Pondok Gede Hasilnya Gagal..... 207
5. Lemahnya Posisi Mahkamah Partai Politik dalam Penyelesaian Sengketa Internal Partai Politik 211
B. Konsensus Melalui Pengadilan..... 215
1. Kedua Kubu Saling Menggugat Ke Pengadilan..... 216
2. Kronologis Gugatan ke Pengadilan Kedua Kubu 220
3. Akhirnya Kubu Rommy Menang di PK (No. 79 PK/Pdt.Sus-Parpol/2016) Pada Juni 2017..... 233

C. Konsensus Melalui Politik 239
1. Dukungan Empat Unsur Fusi PPP dalam Upaya Perdamaian Konflik PPP..... 245
2. Dukungan tokoh Politik Nasional..... 248
3. Koalisi dan Posisi di Kekuatan Pemerintahan 251
4. Tekanan Lembaga Legislatif 253
5. Faktor-faktor yang Mendorong Djan Faridz Bersedia Berdamai dengan Rommy 255
6. Konflik Berakhir Dengan Bergabungnya Djan Faridz Dengan Kubu Rommy Dalam Muktamar IX di Makassar 257
7. Perdamaian Djan Faridz vs Rommy dalam Perspektif Budaya Politik Indonesia..... 261
BAB V DAMPAK KONFLIK YANG TERJADI DI INTERNAL PPP 263
A. Dualisme Kepengurusan di Internal PPP dan Pilkada..... 263
B. Keluarnya tokoh-Tokoh PPP ke Partai Lain..... 275
C. Penurunan suara PPP Pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019..... 283
BAB VI PENUTUP 303
A. Kesimpulan..... 303
B. Implikasi teori..... 309
C. *Affirmative Action* : PPP Masih Layak untuk Dipertahankan 322
DAFTAR PUSTAKA 334
LAMPIRAN 365

UNIVERSITAS NASIONAL

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Informan Eksternal 65
Tabel 2 Informan Internal 65
Tabel 3 Peta Konflik Internal PPP Selama Oder Baru 79
Tabel 4 Kronologi Konflik Ideologi (Asas tunggal Pancasila) PPP vs Orde Baru (1983-1987) 88
Tabel 5 Penolakan Islah oleh Kubu Zainuddin MZ terhadap Hamzah Haz 104
Tabel 6 Langkah-Langkah Hamzah Haz vs tuntutan Kubu Zainuddin MZ 106
Tabel 7 Upaya Penyelesaian Konflik Kubu Hamzah Haz vs. Kubu Zainuddin MZ 111
Tabel 8 Perbandingan Krisis Kepemimpinan dan Pragmatisme Politik PPP .. 115
Tabel 9 Dualisme Kepengurusan PPP Versi Muktamar Surabaya dan Muktamar Jakarta dan Sikap Politik..... 128
Tabel 10 Intensitas Konflik Internal PPP (2009-2014) 189
Tabel 11 Kronologis Gugatan kedua kubu mulai dari PTUN, MA,MK,PN, MA, PTUN, MA terkait SK Kemenkum HAM yang mengesahkan kepengurusan Muktanar Surabaya vs Kepengurusan Muktamar Jakarta 230
Tabel 12 Langkah, Sikap dan Hasil Islah Ke dua Kubu Rommy vs Djan Faridz 243
Tabel 13 Perolehan Suara dan Kursi DPR Menurut Partai Politik Hasil Pemilu Legislatif 2014..... 286
Tabel 14 Hasil Perolehan Suara Semua Parpol Pileg 2019 (DPR RI)..... 294
Tabel 15 Penurunan Suara PPP (2014 vs 2019) 296

UNIVERSITAS NASIONAL

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Pemikiran 60
Gambar 2 Pasang Surut Perolehan Suara PPP Pemilu 1999-2019 292
Gambar 3 Grafik Penurunan Suara PPP 296

UNIVERSITAS NASIONAL

DAFTAR SINGKATAN/AKRONIM LENGKAP

Singkatan	Kepanjangan/Penjelasan Singkat
AD/ART	Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
BRIN	Badan Riset dan Inovasi Nasional
DPC	Dewan Pimpinan Cabang
DPW	Dewan Pimpinan Wilayah
DPP	Dewan Pimpinan Pusat
GBK	Gelora Bung Karno
KIH	Koalisi Indonesia Hebat
KMP	Koalisi Merah Putih
Kemendagri	Kementerian Dalam Negeri
Kemenkumham	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
KPU	Komisi Pemilihan Umum
LIPI	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
MA	Mahkamah Agung
MK	Mahkamah Konstitusi
NU	Nahdlatul Ulama
Parmusi	Partai Muslimin Indonesia
Perti	Persatuan Tarbiyah Islamiyah
PN	Pengadilan Negeri
PK	Peninjauan Kembali
PKS	Partai Keadilan Sejahtera
Pilkada	Pemilihan Kepala Daerah
PPATK	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
PPPR	Partai Persatuan Pembangunan Reformasi
PT	Parliamentary Threshold
PT TUN	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Reunifikasi	Penyatuan kembali pihak yang terpecah
SI	Syarikat Islam
Watimpres	Dewan Pertimbangan Presiden
Koalisi	Kerja sama atau aliansi antara dua pihak atau lebih, biasanya partai politik, untuk mencapai tujuan bersama
Muktamar Islah	Muktamar partai untuk menyelesaikan konflik internal dan mewujudkan rekonsiliasi
Muktamar Tandingan	Muktamar partai yang diselenggarakan oleh faksi tertentu sebagai klaim kepemimpinan sah

UNIVERSITAS NASIONAL

GLOSARI/ISTILAH KHUSUS LENGKAP

Istilah	Penjelasan
Affirmative Action	Kebijakan yang memberikan peluang khusus untuk kelompok tertentu untuk memperbaiki ketimpangan historis atau structural
Algoritma	Serangkaian langkah atau prosedur sistematis untuk menyelesaikan masalah atau analisis data
Amar Putusan	Putusan resmi pengadilan yang bersifat final dan mengikat
Citra	Persepsi atau penilaian publik terhadap reputasi individu, partai, atau organisasi
Crisis of Mutual Trust	Kehilangan kepercayaan antara pihak-pihak yang berkonflik, menyulitkan rekonsiliasi
De-ideologi Islam	Mengurangi pengaruh nilai-nilai ideologi Islam dalam praktik politik
De-islamisasi	Mengurangi pengaruh nilai-nilai Islam dalam ideologi, kebijakan, atau praktik politik
Deformalisasi Islam	Melemahkan aturan atau praktik formal berbasis nilai-nilai Islam sehingga lebih fleksibel
Dilema Ideologis	Konflik antara prinsip ideologi dan kepentingan pragmatis politik
Deligitimasi	Mengurangi atau menghilangkan legitimasi individu, partai, atau keputusan
Eskalasi	Peningkatan intensitas atau ketegangan konflik
Faksionalisme	Kecenderungan partai terpecah menjadi faksi-faksi yang bersaing berdasarkan figur atau kepentingan politik
Fusi	Penyatuan atau integrasi antarpartai atau kelompok yang berbeda menjadi satu kesatuan
Forget & Forgiveness	Konsep rekonsiliasi: melupakan kesalahan masa lalu dan memaafkan pihak lain
Izzul Islam wal Muslimin	Prinsip perjuangan umat Islam yang menekankan kemuliaan dan kepentingan umat Muslim
Intensitas	Tingkat keterbukaan, luas, dan dampak konflik terhadap pihak internal maupun eksternal
Khitah	Prinsip dasar atau garis perjuangan organisasi atau partai
Konsensus	Kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang berkonflik
Konsensus Model Gabungan	Model penyelesaian konflik yang menggabungkan pendapat pihak internal dan pihak luar
Konsensus Model Pengadilan	Model penyelesaian konflik melalui jalur hukum ketika konsensus gagal
Kader	Anggota atau pengurus partai yang aktif dan memiliki peran dalam pengambilan keputusan

Istilah	Penjelasan
Legitimasi	Pengakuan atau penerimaan sah suatu kepemimpinan atau keputusan
Lobby	Upaya mempengaruhi pengambilan keputusan politik
Majlis Kehormatan	Dewan tokoh senior/ulama yang memberi nasihat moral atau pertimbangan dalam partai
Marwah	Kehormatan, wibawa, atau martabat individu atau organisasi
Mediator	Pihak yang memfasilitasi penyelesaian konflik
Militan	Individu atau kelompok yang menunjukkan loyalitas tinggi terhadap partai atau ideologi
Non-*Zero-sum Conflict*	Konflik di mana kedua pihak masih dapat memperoleh keuntungan bersama melalui kompromi
Novelty	Unsur kebaruan atau inovasi dalam dinamika partai atau konflik politik
Oposisi	Pihak atau kelompok yang menentang pemerintah atau partai penguasa
Opini	Pandangan atau pendapat yang disampaikan individu, media, atau publik
Paradigma Ideologis	Kerangka pemikiran yang mendasari ideologi suatu partai atau kelompok
Platform	Dasar program, visi, dan misi partai atau kelompok politik
Preferensi	Pilihan atau kecenderungan individu/kelompok terhadap sesuatu
Pragmatisme	Pendekatan politik yang menekankan hasil dan keuntungan praktis
Representasi Politik	Perwujudan kepentingan suatu kelompok dalam pengambilan keputusan politik
Rekonsiliasi	Proses mengakhiri konflik dan membangun kembali hubungan harmonis
Trajektori	Jalur atau arah perkembangan peristiwa atau konflik
Trautama Psikologis	Dampak psikologis mendalam akibat pengalaman traumatis termasuk konflik politik
Zero-sum Conflict	Konflik di mana keuntungan satu pihak selalu diikuti kerugian pihak lain